



SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

RAJA HAJI

Jln. Raja Haji Fisabilillah No. 48, Telp. (0771) 7000652

T A N J U N G P I N A N G

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI TANJUNGPINANG

Nomor : 1029 /A.1/26/ 2021

Tentang

PENETAPAN KURIKULUM SARJANA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK, ILMU PEMERINTAHAN DAN SOSIOLOGI STISIPOL RAJA HAJI

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI

- Memperhatikan : 1. Memperhatikan rapat pimpinan dan dosen pada tanggal 6 Mei 2021 tentang pemberlakuan merdeka belajar – kampus merdeka di lingkungan STISIPOL Raja Haji;
2. Laporan-laporan peninjauan kurikulum oleh program studi Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan dan Sosiologi STISIPOL Raja Haji;
- Menimbang : 1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran proses pendidikan, pengajaran serta tertib administrasi pendidikan di STISIPOL Raja Haji dipandang perlu adanya keputusan yang mengatur penyelenggaraan kurikulum kampus merdeka yang mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) dan standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti);
2. Bahwa kurikulum 2012 yang berlaku sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dipandang perlu adanya perubahan, penambahan dan penyempurnaan.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 perlu menetapkan kurikulum program studi Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan dan Sosiologi STISIPOL Raja Haji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan pemerintah Nomor: 4 tahun 2014 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 133/D/O/1999 tanggal 22 Juli 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji dan Pemberian Status Terdaftar kepada 3 (Tiga) Program Studi untuk Jenjang Pendidikan S-1 di Lingkungan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji di Tanjungpinang.
7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional perguruan tinggi (BAN-PT) Nomor: 7006/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 Tentang Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang.

9.....

- 8 Keputusan Badan Akreditasi Nasional perguruan tinggi (BAN-PT) Nomor: 6915/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 tentang Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang.
- 9 Keputusan Badan Akreditasi Nasional perguruan tinggi (BAN-PT) Nomor: 032/BAN-PT/Ak-XV/SI/X/2021 Tentang Akreditasi Program Studi Sarjana Sosiologi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang.
- 10 Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 27/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PT/I/2021 tentang Pemenuhan syarat peringkat akreditasi Perguruan tinggi Stisipol Raja Haji, kota Tanjungpinang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Kurikulum Sarjana Program Studi Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan Dan Sosiologi Stisipol Raja Haji.
- Kedua : Kurikulum Tahun 2021 ini merupakan dasar pelaksanaan pengaturan penyelenggaraan kegiatan akademik STISIPOL Raja Haji sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Menyesuaikan nama-nama mata kuliah lama yang telah ditempuh oleh mahasiswa dengan nama-nama mata kuliah baru sesuai dengan kurikulum 2021.
- Keempat : Apabila dalam rangka proses penyesuaian nama-nama mata kuliah lama menjadi mata kuliah baru sebagaimana poin ke tiga (3) terdapat perbedaan objek kajian antara mata kuliah yang lama dengan yang baru tetap dapat dilakukan.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada anggaran belanja STISIPOL Raja Haji;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada Tanggal : 19 Agustus 2021



KETUA,

Endri Sanopaka, S.Sos., MPM
Lektor, NIDN 1005118101

Tembusan :

1. Yth. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) Wilayah X di Padang.
2. Ketua Yayasan Raja Haji Fisabilillah.
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua STISIPOL Raja Haji No. 1029 /A.1/26/ 2021

Tentang : Penetapan Kurikulum Sarjana Program Studi Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan Dan Sosiologi

KURIKULUM PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK TAHUN 2021

SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRA SYARAT
I	1	RUP 121	Pendidikan Agama	2	
	2	RUP 122	Pendidikan Pancasila	2	
	3	RUP 125	Bahasa Inggris	2	
	4	RUP 126	Ilmu Budaya Dasar	2	
	5	RUI 131	Dasar Logika	3	
	6	RUI 132	Pengantar Ilmu Politik	3	
	7	RUI 133	Pengantar Sosiologi	3	
	8	RUI 135	Asas-asas Manajemen	3	
JUMLAH				20	
II	1	AUI 238	Pengantar Administrasi Publik	3	
	2	RUP 223	Pendidikan Kewarganegaraan	2	
	3	RUP 224	Bahasa Indonesia	2	
	4	RUI 234	Pengantar Antropologi	3	
	5	RUI 237	Sistem Hukum Indonesia	3	
	6	AUI 230	Dasar Akuntansi	3	
	7	AUK 224	Komputer Terapan	2	
JUMLAH				18	
SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRA SYARAT
III	1	RUK 332	Sistem Sosial Budaya Indonesia	3	RUI 133
	2	RUK 333	Sistem Politik Indonesia	3	RUI 132
	3	AUI 339	Kebijakan Publik	3	
	4	RUK 331	Sistem Ekonomi Indonesia	3	
	5	AUM 331	Sistem Administrasi Negara	3	AUI 238
	6	AUS 331	Hukum Administrasi Negara	3	
	7	AUS 332	Manajemen Pembangunan	3	RUI 135, AUI 238
JUMLAH				21	
SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRA SYARAT
IV	1	RUI 436	Pengantar Statistik Sosial	3	
	2	AUK 435	Metode Penelitian Sosial	3	
	3	AUS 433	Teori Organisasi	3	RUI135, AUI238
	4	AUK 437	Manajemen Strategik Sektor Publik	3	RUI135
	5	AUS 434	Kuangan Negara	3	AUM331
	6	AUI 431	Pengantar Perpajakan	3	
JUMLAH				18	
SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRA SYARAT
V	1	AUS 535	Perilaku Organisasi	3	AUS433
	2	AUK 538	Metode Penelitian Adm Publik	3	AUK435, RUK436
	3	AUK 539	MSDM Sektor Publik	3	RUI135
	Konsentrasi Manajemen Publik			9	
	1	ABI 531	Manajemen Pelayanan Publik	3	RUI135, AUM331
	2	ABK 534	Manajemen Aset dan Proyek	3	RUI135, AUM331
	3	ABI 533	Manajemen Perusahaan Negara	3	RUI135, AUM331
	Konsentrasi Kebijakan Publik			9	
	1	AAI 531	Analisis Kebijakan Publik	3	AUM331, AUI339
	2	AAI 532	Pengambilan Keputusan	3	AUM331, AUI339
	3	AAI 533	Studi Implementasi Kebijakan	3	AUM331, AUI339
	Konsentrasi Perpajakan			9	
	1	ACI 531	Akuntansi Sektor Publik	3	AUM331, AUI431
	2	ACI 532	Pemeriksaan Publik	3	AUM331, AUI431
	3	ACI 533	Pajak dan Retribusi Daerah	3	AUM331, AUI431
JUMLAH				18	

SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRA SYARAT
VI	1	RUM 636	KKN	3	≥ 80 SKS
	2	AUS 637	Seminar Administrasi Publik	3	≥ 97 SKS, RUI436, AUK435, AUK538
	3	AUM 621	Sejarah dan Budaya Melayu	2	
	4		MK. Wajib Konsentrasi	6	
	5		MK. Pilihan Program Studi	6	
			Konsentrasi Kebijakan Publik	6	
	1	AAK 634	Evaluasi dan Analisis Dampak	3	AUM331, AUI339
	2	AAK 635	Ekonomi Politik dan Kebijakan	3	AUM331, AUI340
			Konsentrasi Manajemen Publik	6	
	1	ABI 632	Manaj. Perubah & Pengemb. Organisasi	3	RUI135, AUM331
	2	ABK 635	Manajemen Lingkungan	3	RUI135, AUM331
			Konsentrasi Adm Perpajakan	6	
	1	ACK 634	Pajak Penghasilan	3	AUM331, AUI431
	2	ACK 635	Perbankan Sektor Publik	3	AUM331, AUI431
			Mata Kuliah Pilihan Program Studi (Pilih 6 SKS dari 12 SKS)		
	1	APS 631	Good Governance And Corruption Issue	3	
	2	APM 638	Kebijakan Kependudukan	3	
	3	APM 636	Pembangunan Perkotaan	3	
	4	APM 637	Pemberdayaan Masyarakat	3	
JUMLAH				20	
SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRA SYARAT
VII	1	AUM 734	Penganggaran Publik	3	AUS 434
	2	APS 733	Komunikasi dan Advokasi Kebijakan	3	AUI339
	3	AUS 738	Kepemimpinan	3	AUS433
	4	AUK 736	Governansi Digital	3	RUI135
			MK. Pilihan Program Studi	6	
			Mata Kuliah Pilihan Program Studi (Pilih 6 SKS dari 9 SKS)		
	1	APM 735	Manajemen Pariwisata	3	RUI135
	2	APK 734	Akuntansi Perpajakan	3	AUI431
	3	APS 731	Etika dan Akuntabilitas	3	AUM331
JUMLAH				18	
SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRA SYARAT
VIII	1	AUM 833	Perbandingan Administrasi Publik	3	AUM331
	2	AUM 835	Birokrasi dan Governansi Publik	3	AUM331
	3	RUS 869	Skripsi	6	
JUMLAH				12	

Catatan:

- 1 Mahasiswa semester 2 hanya dapat menempuh maksimal seluruh mata kuliah sesuai panduan kecuali mahasiswa anulan
- 2 Nilai mata kuliah seminar diberikan setelah mahasiswa melaksanakan seminar usulan penelitian
- 3 Pemilihan Konsentrasi dilaksanakan pada semester 5
- 4 Mahasiswa yang melaksanakan program merdeka belajar mengisi KRS pada menu KRS merdeka belajar di laman portal akademik
- 5 Mahasiswa yang melaksanakan program merdeka belajar mendapatkan pembebasan syarat mata kuliah prasyarat pada mata kuliah semester berikutnya
- 6 Mata kuliah yang dapat dipilih dalam rangka melaksanakan program merdeka belajar pada semester 4 terbatas pada mata kuliah yang diseleggarakan pada semester berjalan
- 7 Dalam hal melaksanakan program merdeka belajar jumlah mata kuliah lintas prodi yang dipilih mahasiswa tidak sampai 18 SKS maka mahasiswa wajib memilih mata kuliah dari prodi asal sampai mencukupi jumlah sks sesuai kurikulum

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 19 Agustus 2021

KETUA,

Dto

Endri Sanopaka, S.Sos., MPM
Lektor, NIDN 1005118101

Lampiran : Keputusan Ketua STISIPOL Raja Haji No. 1029 /A.1/26/ 2021
Tentang : Penetapan Kurikulum Sarjana Program Studi Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan Dan Sosiologi

DAFTAR KONVERSI NILAI MATA KULIAH DARI KURIKULUM 2012 KE KURIKULUM 2021 PRODI ADMINISTRASI PUBLIK

No	KODE MK	MATA KULIAH KURIKULUM 2012	SKS	KODE MK	MATA KULIAH KURIKULUM 2021	SKS	KETERANGAN
1	RUP 121	Pendidikan Agama	2	RUP 121	Pendidikan Agama	2	
2	RUP 122	Pendidikan Pancasila	2	RUP 122	Pendidikan Pancasila	2	
3	RUP 125	Bahasa Inggris	2	RUP 125	Bahasa Inggris	2	
4	RUP 126	Ilmu Budaya Dasar	2	RUP 126	Ilmu Budaya Dasar	2	
5	RUI 131	Dasar Logika	3	RUI 131	Dasar Logika	3	
6	RUI 132	Pengantar Ilmu Politik	3	RUI 132	Pengantar Ilmu Politik	3	
7	RUI 133	Pengantar Sosiologi	3	RUI 133	Pengantar Sosiologi	3	
8	RUI 135	Asas-asas Manajemen	3	RUI 135	Asas-asas Manajemen	3	
9	AUI 238	Pengantar Ilmu Adm Publik	3	AUI 238	Pengantar Ilmu Adm Publik	3	
10	RUP 223	Pendidikan Kewarganegaraan	2	RUP 223	Pendidikan Kewarganegaraan	2	
11	RUP 224	Bahasa Indonesia	2	RUP 224	Bahasa Indonesia	2	
12	RUI 234	Pengantar Antropologi	3	RUI 234	Pengantar Antropologi	3	
13	RUI 237	Sistem Hukum Indonesia	3	RUI 237	Sistem Hukum Indonesia	3	
14	AUI 230	Dasar Akuntansi	3	AUI 230	Dasar Akuntansi	3	
15	AUM 222	Sejarah dan Budaya Melayu	2	AUM 622	Sejarah dan Budaya Melayu	2	
16	AUK 214	Komputer Terapan	1	AUK 224	Komputer Terapan	2	Di Konversi
17	RUK 332	Sistem Sosial Budaya Indonesia	3	RUK 332	Sistem Sosial Budaya Indonesia	3	
18	RUK 333	Sistem Politik Indonesia	3	RUK 333	Sistem Politik Indonesia	3	
19	AUI 339	Kebijakan Publik	3	AUI 339	Kebijakan Publik	3	
20	RUK 331	Sistem Ekonomi Indonesia	3	RUK 331	Sistem Ekonomi Indonesia	3	
21	AUM 331	Administrasi Publik Indonesia	3	AUM 331	Sistem Administrasi Negara	3	Di Konversi
22	AUS 331	Etika dan Akuntabilitas	3	APS 731	Etika dan Akuntabilitas	3	
23	AUS 332	Manajemen Pembangunan	3	AUS 332	Manajemen Pembangunan	3	
24	RUI 436	Pengantar Statistik Sosial	3	RUI 436	Pengantar Statistik Sosial	3	
25	AUK 435	Metode Penelitian Sosial	3	AUK 435	Metode Penelitian Sosial	3	
26	AUS 433	Teori Organisasi Publik	3	AUS 433	Teori Organisasi	3	
27	AUK 437	Manajemen Strategik Sektor Publik	3	AUK 437	Manajemen Strategik Sektor Publik	3	
28	AUS 434	Keuangan Publik	3	AUS 434	Keuangan Negara	3	Di Konversi
29	AUI 431	Pengantar Perpajakan	3	AUI 431	Pengantar Perpajakan	3	
30	AUK 436	E - Government	3	AUK 736	Governansi Digital	3	Di Konversi
31	AUS 535	Perilaku Organisasi	3	AUS 535	Perilaku Organisasi	3	
32	AUK 538	Metode Penelitian Adm Publik	3	AUK 538	Metode Penelitian Adm Publik	3	
33	AUK 539	Manajemen Sumber Daya Manusia	3	AUK 539	MSDM Sektor Publik	3	Di Konversi
34	AUS 536	Kepemimpinan	3	AUS 738	Kepemimpinan	3	
35	ABI 531	Manajemen Pelayanan Publik	3	ABI 531	Manajemen Pelayanan Publik	3	
36	ABK 534	Manajemen Aset dan Proyek	3	ABK 534	Manajemen Aset dan Proyek	3	
37	ABI 533	Manajemen Perusahaan Negara	3	ABI 533	Manajemen Perusahaan Negara	3	
38	AAI 531	Analisis Kebijakan	3	AAI 531	Analisis Kebijakan Publik	3	Di Konversi
39	AAI 532	Formulasi dan Legitimasi	3	AAI 532	Pengambilan Keputusan	3	Di Konversi
40	AAI 533	Studi Implementasi Kebijakan	3	AAI 533	Studi Implementasi Kebijakan	3	
41	ACI 531	Akuntansi Sektor Publik	3	ACI 531	Akuntansi Sektor Publik	3	
42	ACI 532	Pemeriksaan Publik	3	ACI 532	Pemeriksaan Publik	3	
43	ACI 533	Pajak dan Retribusi Daerah	3	ACI 533	Pajak dan Retribusi Daerah	3	
44	RUM 636	KKN	3	RUM 636	KKN	3	
45	AUS 637	Seminar Administrasi Publik	3	AUS 637	Seminar Administrasi Publik	3	
46	AAK 634	Evaluasi dan Analisis Dampak	3	AAK 634	Evaluasi dan Analisis Dampak	3	
47	AAK 635	Ekonomi Politik dan Kebijakan	3	AAK 635	Ekonomi Politik dan Kebijakan	3	
48	ABI 632	Manaj. Perubah & Pengemb. Organisasi	3	ABI 632	Manaj. Perubah & Pengemb. Organisasi	3	
49	ABK 635	Manajemen Lingkungan	3	ABK 635	Manajemen Lingkungan	3	
50	ACK 634	Pajak Penghasilan	3	ACK 634	Pajak Penghasilan	3	
51	ACK 635	Perbankan Sektor Publik	3	ACK 635	Perbankan Sektor Publik	3	
52	APS 631	Good Governance And Corruption Issue	3	APS 631	Good Governance And Corruption Issue	3	
53	APM 638	Kebijakan Kependudukan	3	APM 638	Kebijakan Kependudukan	3	
54	APM 636	Pembangunan Perkotaan	3	APM 636	Pembangunan Perkotaan	3	
55	APM 637	Pemberdayaan Masyarakat	3	APM 637	Pemberdayaan Masyarakat	3	
56	PUM 632	Sistem Kepartaian & Pemilu Indonesia	3	APM 735	Manajemen Pariwisata	3	Di Konversi
57	PAS 632	Pemerintahan dan Politik Lokal	3	APM 736	Manajemen Pariwisata	3	Di Konversi
58	SUS 634	Pembangunan Partisipatif	3	APM 737	Manajemen Pariwisata	3	Di Konversi
59	AUM 734	Penganggaran Publik	3	AUM 734	Penganggaran Publik	3	
60	APM 735	Manajemen Pariwisata	3	APM 735	Manajemen Pariwisata	3	
61	APK 734	Akuntansi Perpajakan	3	APK 734	Akuntansi Perpajakan	3	
62	APS 732	Hukum Administrasi Negara	3	AUS 331	Hukum Administrasi Negara	3	
63	APS 733	Komunikasi Administrasi	3	APS 733	Komunikasi Dan Advokasi Kebijakan	3	Di Konversi
64	PUK 534	Studi Legislasi	3	AUM 837	Birokrasi dan Governansi Publik	3	
65	SPK 533	Sosiologi Masyarakat Kepulauan	3	AUM 835	Birokrasi dan Governansi Publik	3	Di Konversi
66	SUK 536	Sosiologi Perkotaan	3	AUM 836	Birokrasi dan Governansi Publik	3	Di Konversi
67	AUM 833	Perbandingan Administrasi Publik	3	AUM 837	Perbandingan Administrasi Publik	3	
68	RUS 869	Skripsi	6	RUS 869	Skripsi	6	

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 19 Agustus 2021

KETUA,

Dto

Endri Sanopaka, S.Sos., MPM
Lektor, NIDN 1005118101

KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN TAHUN 2021

SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRA SYARAT
I	1	RUP 121	Pendidikan Agama	2	
	2	RUP 122	Pendidikan Pancasila	2	
	3	RUP 125	Bahasa Inggris	2	
	4	RUP 126	Ilmu Budaya Dasar	2	
	5	RUI 134	Pengantar Sosiologi	3	
	6	RUI 135	Asas-asas Manajemen	3	
	7	RUI 132	Pengantar Ilmu Politik	3	
	8	RUI 131	Dasar Logika	3	
JUMLAH				20	
II	1	RUP 223	Pendidikan Kewarganegaraan	2	
	2	RUP 224	Bahasa Indonesia	2	
	3	RUI 233	Pengantar Antropologi	3	
	4	PUI 231	Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan	3	
	5	RUI 236	Pengantar Statistik Sosial	3	
	6	RUI 237	Sistem Hukum Indonesia	3	
	7	PUI 233	Teori Pembangunan	3	
JUMLAH				19	
SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRA SYARAT
III	1	RUK 331	Sistem Ekonomi Indonesia	3	
	2	RUK 332	Sistem Sosial dan Budaya Indonesia	3	RUP 126
	3	RUK 333	Sistem Politik Indonesia	3	RUI 132
	4	PUK 332	Teknologi Informasi Pemerintahan	3	PUI 231
	5	PUS 331	Organisasi dan Manajemen Pemerintahan	3	RUI 135,PUI231
	6	PUM 331	Pemerintahan Nasional	3	PUI 231
	7	PUM 332	Politik dan Hukum Agraria	2	RUI 132
JUMLAH				20	
SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRA SYARAT
IV	1	PUS 432	Birokrasi Pemerintahan	3	PUI 231
	2	PUS 433	Pemerintahan Daerah	3	PUM 331
	3	PUM 433	Politik Luar Negeri Indonesia	3	RUK 333
	4	PUK 433	Komunikasi Pemerintahan	3	PUK 332
	5	PUI 432	Metode Penelitian Sosial	3	RUI 131, RUI 236
	6	PUI 434	Teori Politik dan Pemikiran Politik Indonesia	3	RUK 333
JUMLAH				18	
SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRA SYARAT
V		PUS 534	Metodelogi Ilmu Pemerintahan	3	PUI 432
		PUK 535	Pemerintahan Desa	3	PUI 432
		PUM 534	Kebijakan Sektor Publik	3	PUI 231
		PUK 534	Studi Konstitusi dan Legislasi	3	
		PUK 536	Tata Kelola Pemerintahan	3	RUI 135, PUI 231
			Mata Kuliah Wajib Konsentrasi	3	
			Konsentrasi Pemerintah Daerah Dan Politik Lokal		
		PAI 531	Perencanaan Pembangunan & Penganggaran Pemerintah Daerah	3	PUI 233, PUS 433
			Konsentrasi Legislasi Dan Kebijakan		
		PBI 531	Analisis Dampak Sosial Kebijakan	3	
			Konsentrasi Manajemen Pemerintahan		
		PCK 531	Manajemen Program Pembangunan	3	PUM 534
			Konsentrasi Perencanaan Dan Wilayah		
		PDS 531	Dampak Sosial dan Lingkungan Hidup	3	RUI 135, PUI 233
JUMLAH				18	

SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRA SYARAT
VI		PUK 638	Seminar Ilmu Pemerintahan	3	RUI 236,PUI 432,PUS 534
		PUM 633	Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah	3	PUS 433
		RUM 631	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3	≥ 80 sks
		PUM 634	Tata Kelola Konflik Pemerintahan	3	PUK 536
		PUI 625	Sejarah dan Budaya Melayu	2	
			Mata Kuliah Wajib Konsentrasi	6	
		Konsentrasi Pemerintah Daerah Dan Politik Lokal			
		PAS 632	Pemerintahan dan Politik Lokal	3	PUI 231, PUS 433
		PAM 631	Tata Kelola Keunagan Pemerintahan	3	
			Konsentrasi Legislasi Dan Kebijakan		
		PBK 631	Formulasi dan Implementasi Kebijakan	3	PUM 534
		PBI 632	Evaluasi Kebijakan	3	PUM 534
		Konsentrasi Manajemen Pemerintahan			
		PCS 631	Tata Kelola SDM Pemerintahan	3	RUI 135, PUI 231
		PCK 632	Manajemen Strategis dan Pemerintahan	3	RUI 135, PUI 231
		Konsentrasi Perencanaan Dan Wilayah			
		PDM 631	Manajemen Konflik Pertanahan dan Tata Wilayah	3	RUI 135, PUM 332
		PDK 632	Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang	3	
JUMLAH				20	
SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRA SYARAT
VII		PAS 731	Sosiologi Pemerintahan	3	RUI 134, PUI 231
		PUS 732	Kepemimpinan dan Etika Pemerintahan	3	PUI 231
		PUK 721	Hukum Tata Pemerintahan	3	PUM 534
		PUM 736	Perubahan Sosial Dan Dinamika Pemerintahan	3	PUI 231
		PUS 736	Ekologi Pemerintahan	3	PUI 231
		PUK 638	Seminar Ilmu Pemerintahan	3	RUI236, PUI432, PUS534
			Mata Kuliah Wajib Konsentrasi	3	
		Konsentrasi Pemerintah Daerah Dan Politik Lokal			
		PAM 731	Nasionalisme dan Etnisitas	3	
			Konsentrasi Legislasi Dan Kebijakan		
		PBS 731	Politik Ketenagakerjaan	3	RUI 132
			Konsentrasi Manajemen Pemerintahan		
		PCS 731	Pelayanan Sektor Publik	3	RUI 135, PUI 231
			Konsentrasi Perencanaan Dan Wilayah		
		PCS 732	Manajemen Networking	3	PUK 332, PUK 433
JUMLAH				21	
SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRA SYARAT
VIII	1	PUK 837	Perbandingan Pemerintahan	3	PUM 231
	2	PUI 836	Kebijakan Anti Korupsi	3	PUM 534
	3	RUS 861	Skripsi	6	
JUMLAH				12	

- Catatan:
- Mahasiswa semester 2 hanya dapat menempuh maksimal seluruh mata kuliah sesuai panduan kecuali mahasiswa angulan
 - Nilai mata kuliah seminar diberikan setelah mahasiwa melaksanakan seminar usulan penelitian. Mata kuliah seminar dibuka pada semster ganjil dan genap.
 - Pemilihan Konsentrasi dilaksanakan pada semester 5
 - Mahasiswa yang melaksanakan program merdeka belajar mengisi KRS pada menu KRS merdeka belajar di laman portal akademik
 - Mahasiswa yang melaksanakan program merdeka belajar mendapatkan pembebasan syarat mata kuliah prasyarat pada mata kuliah semester berikutnya
 - Mata kuliah yang dapat dipilih dalam rangka melaksanakan program merdeka belajar pada semester 4 terbatas pada mata kuliah yang diseleggarakan pada semester berjalan
 - Dalam hal melaksanakan program merdeka belajar jumlah mata kuliah lintas prodi yang dipilih mahasiswa tidak sampai 18 SKS maka mahasiswa wajib memilih mata kuliah dari prodi asal sampai mencukupi jumlah sks sesuai
 - Mahasiswa dapat melaksanakan merdeka belajar apabila telah menempuh minimal 45 SKS

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 19 Agustus 2021

KETUA,

Dto

Endri Sanopaka, S.Sos., MPM
Lektor, NIDN 1005118101

Lampiran : Keputusan Ketua STISIPOL Raja Haji No. 1029 /A.1/26/ 2021
Tentang : Penetapan Kurikulum Sarjana Program Studi Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan Dan Sosiologi

DAFTAR KONVERSI NILAI MATA KULIAH DARI KURIKULUM 2012 KE KURIKULUM 2021 PRODI
ILMU PEMERINTAHAN

No	KODE MK	MATA KULIAH KURIKULUM 2012	SKS	KODE MK	MATA KULIAH KURIKULUM 2021	SKS	KETERANGAN
1	RUP 121	Pendidikan Agama	2	RUP 121	Pendidikan Agama	2	
2	RUP 122	Pendidikan Pancasila	2	RUP 122	Pendidikan Pancasila	2	
3	RUP 125	Bahasa Inggris	2	RUP 125	Bahasa Inggris	2	
4	RUP 126	Ilmu Budaya Dasar	2	RUP 126	Ilmu Budaya Dasar	2	
5	RUI 134	Pengantar Sosiologi	3	RUI 134	Pengantar Sosiologi	3	
6	RUI 135	Asas-asas Manajemen	3	RUI 135	Asas-asas Manajemen	3	
7	RUI 132	Pengantar Ilmu Politik	3	RUI 132	Pengantar Ilmu Politik	3	
8	RUI 131	Dasar Logika	3	RUI 131	Dasar Logika	3	
9	RUP 223	Pendidikan Kewarganegaraan	2	RUP 223	Pendidikan Kewarganegaraan	2	
10	RUP 224	Bahasa Indonesia	2	RUP 224	Bahasa Indonesia	2	
11	RUI 233	Pengantar Antropologi	3	RUI 233	Pengantar Antropologi	3	
12	PUI 231	Pengantar Ilmu Pemerintahan	3	PUI 231	Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan	3	Dikonversi
13	RUI 236	Pengantar Statistik Sosial	3	RUI 236	Pengantar Statistik Sosial	3	
14	PUI 225	Sejarah dan Budaya Melayu	2	PUI 625	Sejarah dan Budaya Melayu	2	
15	PUK 221	Asas Hukum Tata Negara	3	PUK 721	Hukum Tata Pemerintahan	3	Dikonversi
16	RUI 237	Sistem Hukum Indonesia	3	RUI 237	Sistem Hukum Indonesia	3	
17	PUI 233	Teori Pembangunan	3	PUI 233	Teori Pembangunan	3	
18	RUK 331	Sistem Ekonomi Indonesia	3	RUK 331	Sistem Ekonomi Indonesia	3	
19	RUK 332	Sistem Sosial dan Budaya Indonesia	3	RUK 332	Sistem Sosial dan Budaya Indonesia	3	
20	RUK 333	Sistem Politik Indonesia	3	RUK 333	Sistem Politik Indonesia	3	
21	PUK 332	E-Government	3	PUK 332	Teknologi Informasi Pemerintahan	3	Dikonversi
22	PUS 331	Organisasi dan Manajemen Pemerintahan	3	PUS 331	Organisasi dan Manajemen Pemerintahan	3	
23	PUM 331	Sistem Pemerintahan Republik Indonesia	3	PUM 331	Pemerintahan Nasional	3	Dikonversi
24	PUS 332	Kepemimpinan dan Etika Pemerintahan	3	PUS 332	Kepemimpinan dan Etika Pemerintahan	3	
25	PUM 431	Politik dan Hukum Agraria	2	PUM 431	Politik dan Hukum Agraria	2	
26	PUS 432	Birokrasi Indonesia	3	PUS 432	Birokrasi Indonesia	3	
27	PUS 433	Sistem Pemerintahan Daerah	3	PUS 433	Pemerintahan Daerah	3	Dikonversi
28	PUM 432	Sistem Kepartaian dan Pemilu Indonesia	3	PUM 432	Sistem Kepartaian dan Pemilu Indonesia	3	
29	PUK 433	Komunikasi Pemerintahan	3	PUK 433	Komunikasi Pemerintahan	3	
30	PUI 432	Metode Penelitian Sosial	3	PUI 432	Metode Penelitian Sosial	3	
31	PUI 434	Teori Politik dan Pemikiran Politik Indonesia	3	PUI 434	Teori Politik dan Pemikiran Politik Indonesia	3	
32	PPM 434	Manajemen Konflik	3	PUM 634	Tata Kelola Konflik Pemerintahan	3	Dikonversi
33	PAI 531	Perencanaan Pembangunan & Penganggaran Pemerintah Daerah	3	PAI 531	Perencanaan Pembangunan & Penganggaran Pemerintah Daerah	3	
34	PBI 531	Analisis Dampak Sosial Kebijakan	3	PBI 531	Analisis Dampak Sosial Kebijakan	3	
35	PCK 531	Manajemen Program Pembangunan	3	PCK 531	Manajemen Program Pembangunan	3	
36	PDS 531	Dampak Sosial dan Lingkungan Hidup	3	PDS 531	Dampak Sosial dan Lingkungan Hidup	3	
37	PUS 534	Metodelogi Ilmu Pemerintahan	3	PUS 534	Metodelogi Ilmu Pemerintahan	3	
38	PUK 535	Sistem Pemerintahan Desa	3	PUK 535	Pemerintahan Desa	3	Dikonversi
39	PUM 534	Kebijakan Pemerintah	3	PUM 534	Kebijakan Sektor Publik	3	Dikonversi
40	PUK 534	Studi Legislasi	3	PUK 534	Studi Konstitusi dan Legislasi	3	Dikonversi
41	PPK 532	Manajemen Pembangunan	3	PUK 536	Tata Kelola Pemerintahan	3	Dikonversi
42	PAS 632	Pemerintahan dan Politik Lokal	3	PAS 632	Pemerintahan dan Politik Lokal	3	
43	PAM 631	Kuangan Negara dan Daerah	3	PAM 631	Tata Kelola Keuangan Pemerintahan	3	Dikonversi
44	PBK 631	Formulasi dan Implementasi Kebijakan	3	PBK 631	Formulasi dan Implementasi Kebijakan	3	
45	PBI 632	Evaluasi Kebijakan	3	PBI 632	Evaluasi Kebijakan	3	
46	PCS 631	Manajemen Sumber Daya Aparatur	3	PCS 631	Tata Kelola SDM Pemerintahan	3	Dikonversi
47	PCK 632	Manajemen Strategis dan Pemerintahan	3	PCK 632	Manajemen Strategis dan Pemerintahan	3	
48	PDM 631	Manajemen Konflik Pertanahan dan Tata Wilayah	3	PUM 634	Manajemen Konflik Pertanahan dan Tata Wilayah	3	
49	PDK 632	Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang	3	PDK 632	Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang	3	
50	PUK 638	Seminar Ilmu Pemerintahan	3	PUK 638	Seminar Ilmu Pemerintahan	3	
51	PUM 633	Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah	3	PUM 633	Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah	3	
52	RUM 631	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3	RUM 631	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3	
53	PPI 631	Kebijakan Anti Korupsi	3	PPI 631	Kebijakan Anti Korupsi	3	
54	PAM 731	Nasionalisme dan Etnisitas	3	PAM 731	Nasionalisme dan Etnisitas	3	
55	PBS 731	Politik Ketenagakerjaan	2	PBS 731	Politik Ketenagakerjaan	2	
56	PCS 731	Manajemen Pelayanan Publik	3	PCS 731	Pelayanan Sektor Publik	3	Dikonversi
57	PCS 732	Manajemen Networking	3	PCS 732	Manajemen Networking	3	
58	PAS 731	Sosiologi Pemerintahan	3	PAS 731	Sosiologi Pemerintahan	3	
59	PPM 731	Perubahan Sosial Dan Dinamika Pemerintahan	3	PPM 731	Perubahan Sosial Dan Dinamika Pemerintahan	3	
60	PPS 731	Ekologi Pemerintahan	3	PPS 731	Ekologi Pemerintahan	3	
61		Seminar Ilmu Pemerintahan	3		Seminar Ilmu Pemerintahan	3	
62	PUK 837	Perbandingan Sistem Pemerintahan	3	PUK 837	Perbandingan Sistem Pemerintahan	3	
63	RUS 861	Skripsi	6	RUS 861	Skripsi	6	

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 19 Agustus 2021

KETUA,

Dto

Endri Sanopaka, S.Sos., MPM
Lektor, NIDN 1005118101

Lampiran : Keputusan Ketua STISIPOL Raja Haji No. 1029 /A.1/26/ 2021

Tentang : Penetapan Kurikulum Sarjana Program Studi Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan Dan Sosiologi

KURIKULUM PROGRAM STUDI SOSIOLOGI TAHUN 2021

SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRA SYARAT
I	1	RUP 121	Pendidikan Agama	2	
	2	RUP 122	Pendidikan Pancasila	2	
	3	RUP 125	Bahasa Inggris I	2	
	4	RUI 131	Dasar Logika	3	
	5	RUI 132	Pengantar Ilmu Politik	3	
	6	RUI 134	Pengantar Sosiologi	3	
	7	RUI 135	Azas-Azas Manajemen	3	
	8	RUI 136	Pengantar Statistik	3	
JUMLAH				21	
II	1	RUP 223	Pendidikan Kewarganegaraan	2	
	2	RUP 224	Bahasa Indonesia	2	
	3	RUI 232	Pengantar Antropologi	3	
	4	SUI 221	Bahasa Inggris II	2	RUP 125
	5	SUI 239	Perubahan Sosial	3	RUI 134
	6	SUI 233	Statistik Sosial	3	RUI 136
	7	SUI 234	Teori Sosiologi Klasik	3	RUI 134
	8	SUS 231	Kewirausahaan	3	
JUMLAH				21	
SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRA SYARAT
III	1	RUI 331	Pengantar Metode Penelitian Sosial	3	RUI 134
	2	RUI 332	Sistem Politik Indonesia	3	RUI 132
	3	RUI 337	Sistem Hukum Indonesia	3	
	4	RUI 338	Sistem Ekonomi Indonesia	3	
	5	RUI 339	Sistem Sosial Budaya Indonesia	3	RUI 232
	6	SUI 335	Teori Sosiologi Modern	3	SUI 234
	7	SUI 337	Dasar-Dasar Jurnalistik	3	
JUMLAH				21	
SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRA SYARAT
IV	1	SPK 436	Sosiologi Ekonomi Dan Bisnis	3	RUI 134
	2	SUK 431	Sosiologi Perdesaan	3	RUI 331
	3	SUK 432	Sosiologi Politik	3	RUI 134
	4	SUK 433	Sosiologi Keluarga	3	RUI 134
	5	SUK 434	Sosiologi Hukum	3	RUI 134
	6	SUK 435	Sosiologi Agama	3	RUI 134
JUMLAH				18	
SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRA SYARAT
V	1	SUI 538	Metode Penelitian Sosiologi Kualitatif	3	SUI 438
	2	SUI 522	Studi Kependudukan	2	
	3	SUK 536	Sosiologi Perkotaan	3	RUI 134
	4	SUK 538	Sosiologi Pembangunan	3	RUI 134
	5	SUK 539	Sosiologi Kebudayaan	3	RUI 134
	6	SPK 531	Pembangunan Kawasan Perbatasan	3	RUI 134
	7	SPK 532	Sosiologi Masyarakat Kepulauan	3	RUI 134
JUMLAH				20	

SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRA SYARAT
VI	1	SUI 638	Metode Penelitian Sosiologi Kuantitatif	3	SUI 538
	2	SUS 634	Pembangunan Partisipatif	3	RUI 134
	3	SUS 635	Sosiologi Terapan	3	RUI 134
	4	RUM 631	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4	≥ 80 sks
	5	SPK 631	Sosiologi Pendidikan	3	RUI 134
	6	SPK 632	Sosiologi Pariwisata	3	RUI 134
JUMLAH				13	
SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRA SYARAT
VII	1	SUK 737	Sosiologi Industri	3	RUI 134
	2	SUS 733	Seminar Masalah Sosiologi	3	SUS 638
	3	SPK 731	Sosiologi Gender	3	
	4	SPK 735	Masalah Sosial Perkotaan	3	
	5	SUS 731	Praktikum Metode Penelitian Sosial	3	
	6	SUI 736	Teori Kritis dan Postmodernisme	3	SUI 335
JUMLAH				15	
SMT	NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRA SYARAT
VIII	1	RUM 861	Skripsi	6	SUS 733
JUMLAH				6	

Catatan:

- 1 Mahasiswa semester 2 hanya dapat menempuh maksimal seluruh mata kuliah sesuai panduan kecuali mahasiswa anjakan
- 2 Nilai mata kuliah seminar diberikan setelah mahasiswa melaksanakan seminar usulan penelitian
- 3 Pemilihan Konsentrasi dilaksanakan pada semester 5
- 4 Mahasiswa yang melaksanakan program merdeka belajar mengisi KRS pada menu KRS merdeka belajar di laman portal akademik
- 5 Mahasiswa yang melaksanakan program merdeka belajar mendapatkan pembebasan syarat mata kuliah prasyarat pada mata kuliah semester berikutnya
- 6 Mata kuliah yang dapat dipilih dalam rangka melaksanakan program merdeka belajar pada semester 4 terbatas pada mata kuliah yang diseleggarakan pada semester berjalan
- 7 Dalam hal melaksanakan program merdeka belajar jumlah mata kuliah lintas prodi yang dipilih mahasiswa tidak sampai 18 SKS maka mahasiswa wajib memilih mata kuliah dari prodi asal sampai mencukupi jumlah sks sesuai kurikulum

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 19 Agustus 2021

KETUA,

Dto

Endri Sanopaka, S.Sos., MPM
Lektor, NIDN 1005118101

Lampiran : Keputusan Ketua STISIPOL Raja Haji No. 1029 /A.1/26/ 2021
Tentang : Penetapan Kurikulum Sarjana Program Studi Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan Dan Sosiologi

DAFTAR KONVERSI NILAI MATA KULIAH DARI KURIKULUM 2012 KE KURIKULUM 2021 PRODI SOSIOLOGI

No	KODE MK	MATA KULIAH KURIKULUM 2012	SKS	KODE MK	MATA KULIAH KURIKULUM 2021	SKS	KETERANGAN
1	RUP 121	Pendidikan Agama	2	RUP 121	Pendidikan Agama	2	
2	RUP 122	Pendidikan Pancasila	2	RUP 122	Pendidikan Pancasila	2	
3	RUP 125	Bahasa Inggris I	2	RUP 125	Bahasa Inggris I	2	
4	RUI 131	Dasar Logika	3	RUI 131	Dasar Logika	3	
5	RUI 132	Pengantar Ilmu Politik	3	RUI 132	Pengantar Ilmu Politik	3	
6	RUI 134	Pengantar Sosiologi	3	RUI 134	Pengantar Sosiologi	3	
7	RUI 135	Azas-Azas Manajemen	3	RUI 135	Azas-Azas Manajemen	3	
8	RUI 136	Pengantar Statistik	3	RUI 136	Pengantar Statistik	3	
9	RUP 223	Pendidikan Kewarganegaraan	2	RUP 223	Pendidikan Kewarganegaraan	2	
10	RUP 224	Bahasa Indonesia	2	RUP 224	Bahasa Indonesia	2	
11	RUI 232	Pengantar Antropologi	3	RUI 232	Pengantar Antropologi	3	
12	SUI 221	Bahasa Inggris II	2	SUI 221	Bahasa Inggris II	2	
13	SUI 222	Studi Kependudukan	2	SUI 222	Studi Kependudukan	2	
14	SUI 233	Statistik Sosial	3	SUI 233	Statistik Sosial	3	
15	SUI 234	Teori Sosiologi Klasik	3	SUI 234	Teori Sosiologi Klasik	3	
16	SUS 231	Kewirausahaan	3	SUS 231	Kewirausahaan	3	
17	RUI 331	Pengantar Metode Penelitian Sosial	3	RUI 331	Pengantar Metode Penelitian Sosial	3	
18	RUI 332	Sistem Politik Indonesia	3	RUI 332	Sistem Politik Indonesia	3	
19	RUI 337	Sistem Hukum Indonesia	3	RUI 337	Sistem Hukum Indonesia	3	
20	RUI 338	Sistem Ekonomi Indonesia	3	RUI 338	Sistem Ekonomi Indonesia	3	
21	RUI 339	Sistem Sosial Budaya Indonesia	3	RUI 339	Sistem Sosial Budaya Indonesia	3	
22	SUI 335	Teori Sosiologi Modern	3	SUI 335	Teori Sosiologi Modern	3	
23	SUI 337	Dasar-Dasar Jurnalistik	3	SUI 337	Dasar-Dasar Jurnalistik	3	
24	SUI 436	Teori Kritis dan Postmodernisme	3	SUI 436	Teori Kritis dan Postmodernisme	3	
25	SUI 438	Metode Penelitian Sosiologi Kualitatif	3	SUI 438	Metode Penelitian Sosiologi Kualitatif	3	
26	SUK 431	Sosiologi Perdesaan	3	SUK 431	Sosiologi Perdesaan	3	
27	SUK 432	Sosiologi Politik	3	SUK 432	Sosiologi Politik	3	
28	SUK 433	Sosiologi Keluarga	3	SUK 433	Sosiologi Keluarga	3	
29	SUK 434	Sosiologi Hukum	3	SUK 434	Sosiologi Hukum	3	
30	SUK 435	Sosiologi Agama	3	SUK 435	Sosiologi Agama	3	
31	SUI 538	Metode Penelitian Sosiologi Kuantitatif	3	SUI 538	Metode Penelitian Sosiologi Kuantitatif	3	
32	SUI 539	Perubahan Sosial	3	SUI 539	Perubahan Sosial	3	
33	SUK 536	Sosiologi Perkotaan	3	SUK 536	Sosiologi Perkotaan	3	
34	SUK 539	Sosiologi Kebudayaan	3	SUK 539	Sosiologi Kebudayaan	3	
35	SUK 538	Sosiologi Pembangunan	3	SUK 538	Sosiologi Pembangunan	3	
36	SPK 531	Pembangunan Kawasan Perbatasan	3	SPK 531	Pembangunan Kawasan Perbatasan	3	
37	SPK 532	Sosiologi Masyarakat Kepulauan	3	SPK 532	Sosiologi Masyarakat Kepulauan	3	
38	SPK 534	sosiologi perilaku menyimpang	3	SPK 534	sosiologi perilaku menyimpang	3	
39	SPK 536	sosiologi konflik	3	SPK 536	sosiologi konflik	3	
40	SUS 631	Praktikum Metode Penelitian Sosial	3	SUS 631	Praktikum Metode Penelitian Sosial	3	
41	SUS 634	Pembangunan Partisipatif	3	SUS 634	Pembangunan Partisipatif	3	
42	SUS 635	Sosiologi Terapan	3	SUS 635	Sosiologi Terapan	3	
43	RUM 631	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4	RUM 631	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4	
44	SPK 631	Sosiologi Pendidikan	3	SPK 631	Sosiologi Pendidikan	3	
45	SPK 632	Sosiologi Pariwisata	3	SPK 632	Sosiologi Pariwisata	3	
46	SUK 737	Sosiologi Industri	3	SUK 737	Sosiologi Industri	3	
47	SUS 733	Seminar Masalah Sosiologi	3	SUS 733	Seminar Masalah Sosiologi	3	
48	SPK 731	Sosiologi Gender	3	SPK 731	Sosiologi Gender	3	
49	PUS 332	Kepemimpinan & Etika Pemerintahan	3	SPK 436	Sosiologi Ekonomi Dan Bisnis	3	Dikonversi
50	AUI 339	Kebijakan Publik	3	SPK 735	Masalah Sosial Perkotaan	3	Dikonversi
51	RUM 861	Skripsi	6	RUM 861	Skripsi	6	

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 19 Agustus 2021

KETUA,

Dto

Endri Sanopaka, S.Sos., MPM
Lektor, NIDN 1005118101